

**ANALISIS MANAJEMEN APLIKASI DIOPEN  
(DISCLOSURE INFORMASI PUBLIK TERINTEGRASI)  
DI PEMERINTAH KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

Afrina Nurlaili Hanifah

NPP. 31.0506

Asdaf Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: afrinanh1103@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Researchers focused on the problem that not all public bodies within the Blitar City Government have implemented the preparation of the Public Information List by Information Commission Regulation Number 1 of 2021 concerning Public Information Service Standards, so an innovation emerged in the formation of the DIOPEN (Disclosure Informasi Publik Terintegrasi) application by the Blitar City Communication, Information, and Statistics Office.

**Purpose:** This study aims to determine how the management of the DIOPEN application in the Blitar City Government. **Method:** The research method used by researchers is a qualitative method and management analysis using POAC Management theory according to George R. Terry. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. **Result:** The result of the research is that application management has been done well. In the planning section, the DIOPEN application was formed because the DIP prepared by each regional apparatus was still manual. In organizing, it is explained that each field in Diskominfo Blitar City is part of the application formation. In actuating, through the DIOPEN application, interaction between the government and the community is formed. In control, it is explained that there are obstacles, namely the need for application performance reports and application maintenance. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, the management of the DIOPEN application is good, it just needs improvement, especially in the budgeting, maintenance, and application performance reports.

**Keywords:** Management, DIOPEN Application, Public Information List.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada permasalahan belum seluruh badan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melaksanakan penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga muncul inovasi pembentukan aplikasi DIOPEN (Disclosure Informasi Publik Terintegrasi) oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen terhadap aplikasi DIOPEN di Pemerintah Kota Blitar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode

kualitatif dan analisis manajemen menggunakan teori Manajemen POAC menurut George R. Terry. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian yaitu manajemen aplikasi sudah dilakukan dengan baik. Pada bagian *planning* adalah aplikasi DIOPEN dibentuk akibat DIP yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah masih manual. Pada *organizing* dijelaskan setiap bidang pada Diskominfo Kota Blitar menjadi bagian dalam pembentukan aplikasi. Pada *actuating*, melalui aplikasi DIOPEN terbentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pada *controlling* dijelaskan adanya kendala yakni perlu laporan kinerja aplikasi dan *maintenance* aplikasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis, manajemen aplikasi DIOPEN sudah baik, hanya saja masih memerlukan perbaikan terutama pada bagian penganggaran, maintenance, dan laporan kinerja aplikasi.

**Kata Kunci : Manajemen, Aplikasi DIOPEN, Daftar Informasi Publik.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kehadiran teknologi informasi di tengah masyarakat membawa perubahan nyata bagi berbagai sektor. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya teknologi turut mengubah kebutuhan pokok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah adanya kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Di era keberlimpahan akan informasi saat ini, siapa saja bisa menjadi bagian dalam memproduksi dan dengan cepat menyebarluaskan informasi.

Pemerintah merupakan salah satu sektor yang berkewajiban dan berkepentingan untuk menyediakan informasi kepada publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Di samping itu, adanya keterbukaan informasi publik menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam mengawal kebijakan maupun ketetapan publik yang berlaku.

Dalam forum *National Assesment Council* yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di tahun 2023, disebutkan bahwa skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di tahun 2023 mencapai angka 75.40 (A.W., 2023). Angka ini meningkat dari dua tahun sebelumnya. Terdapat tiga aspek penting sebagai dasar penentuan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, antara lain persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun penerimaan hak masyarakat atas informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan kepatuhan badan publik terhadap implementasi keterbukaan informasi utamanya kepatuhan dalam mengimplementasikan putusan sengketa informasi publik dalam rangka menjamin pelaksanaan hak masyarakat atas penerimaan informasi.

Pada lingkup pemerintah daerah Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, salah satu tugas yang diemban Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemberian layanan yang cepat, tentunya tidak terlepas dari peran Badan Publik, berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, diperlukan adanya komitmen bahwa setiap Badan Publik wajib untuk

membentuk PPID, menyediakan Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi, dan menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang memuat keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, akan tetapi tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Namun demikian, ekspektasi mengenai layanan informasi publik yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar belum terwujud sepenuhnya dalam realitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Laporan Tahunan PPID Pemerintah Kota Blitar tahun 2021, beberapa permasalahan terkait ketersediaan Daftar Informasi Publik di Kota Blitar saat ini adalah belum seluruhnya badan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melaksanakan penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi adalah belum dilaksanakan pengkajian ulang Standar Operasional Pengguna (SOP) khusus sebagai pedoman pengguna terhadap regulasi terbaru yakni Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan laporan PPID Tahunan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022, pada penggunaan sistem informasi berbasis *website* yang digunakan oleh PPID utama, belum dilaksanakan penyesuaian kembali dengan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia, baik itu SOP untuk pelayanan antar perangkat daerah maupun bagi masyarakat luas. Hal ini berdampak pada belum sesuainya prosedur yang ditempuh baik oleh PPID pelaksana maupun masyarakat (Blitar, 2022).

Isu lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik berdasarkan Laporan Tahunan PPID tahun 2021 adalah pemahaman PPID Pelaksana terhadap Keterbukaan Informasi dan pengelolaan DIP yang belum merata. Agar keterbukaan informasi dapat terlaksana dengan baik, maka setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan Daftar Informasi Publik. Berdasarkan laporan tahunan PPID Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022, pemahaman PPID pelaksana terhadap keterbukaan informasi dan pengelolaan DIP yang belum merata mengakibatkan belum semua Badan Publik melaksanakan proses penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhasil, ketika perangkat daerah maupun masyarakat memerlukan informasi atau mengajukan permohonan seputar informasi yang diperlukan, badan publik terkait tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, baik dalam konteks keterbukaan informasi maupun manajemen dalam sistem informasi. Penelitian oleh Irena Anggrayni menjelaskan adanya manajemen pada aplikasi milik pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan teori manajemen milik George R. Terry dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa

manajemen aplikasi ini berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan (Anggrayni, 2022). Penelitian yang dilakukan Maryanti Sri berjudul Diseminasi Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjar (Maryanti et al., 2022), menemukan bahwa adanya peningkatan output produk informasi publik yang dihasilkan melalui website PPID. Sebelumnya, tanpa adanya bantuan website PPID informasi publik yang dihasilkan hanya berjumlah 19 informasi publik. Setelah adanya bantuan dari website PPID, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu, penelitian oleh Tawakkal Baharudin menyebutkan adanya tren positif dalam pencapaian keterbukaan informasi. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti sosialisasi dan pelatihan dan ketersediaan *command center* (Baharuddin, 2020). Dalam penelitian oleh Romandhon dkk. Disebutkan faktor lain yang berpengaruh pada keberhasilan penerapan sistem informasi adalah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, sikap penggunaan, perilaku tetap menggunakan, dan tingkat pemahaman pengguna berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Romandhon et al., 2022). Urgensi terkait keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pernah tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti E.N., dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Kristiyanto, 2016). Melalui aplikasi maupun sistem informasi akan mempermudah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti contoh pelayanan seputar permohonan informasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dkk, dijelaskan melalui adanya aplikasi keterbukaan informasi dapat membantu KPP untuk memfasilitasi seputar permohonan data informasi (Apriyanti et al., 2020). Tentunya sebelum membuat suatu aplikasi, pasti diperlukan adanya analisis dan perencanaan terlebih dahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad F.P.B, dilakukan analisis dan perancangan aplikasi pelayanan publik *Smart RT/RW* dengan lokus di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dalam melakukan analisis dan perencanaan aplikasi ini, digunakan metode *waterfall* dengan tiga tahap yakni survey, pengembangan aplikasi, dan penerimaan (Bani Muhamad et al., 2020). Adapun metode lain yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap sebuah sistem informasi adalah menggunakan konsep POAC seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Dirgantara A. dan Widiyanti, pada penelitian ini konsep POAC digunakan untuk menganalisis sistem informasi manajemen dalam melakukan distribusi barang (Dirgantara & Widiyanti, 2021). Dalam implementasi sebuah sistem informasi ditemukan beberapa kendala. Dalam penelitian milik Sri Hartati, disebutkan adanya beberapa kendala dalam berjalannya sebuah sistem informasi manajemen, terutama terjadi seputar jaringan dan sumber daya manusia (Hartati & Hadina, 2019). Demikian pula pada penelitian milik Agung Nurrahman, kendala yang terjadi pada implementasi aplikasi terjadi pada sumber daya manusia yang dimiliki. Yakni belum adanya programmer dari instansi terkait (Nurrahman et al., 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas analisis manajemen pada sebuah sistem informasi/aplikasi ditinjau dari segi kelembagaan yang lebih meninjau latar belakang pembentukan aplikasi dari sisi organisasional. Selain itu metode dalam analisis aplikasi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen George

R. Terry (1958) yang meliputi empat tahapan, yakni *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* atau yang biasa dikenal sebagai POAC. Adapun indikator yang digunakan merujuk pada teori yang dideskripsikan oleh George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Management*, disesuaikan dengan konsep penelitian yang dibahas (George R. Terry, 1972).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait manajemen terhadap aplikasi DIOPEN (*Disclosure Informasi Publik Terintegrasi*) di Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang (John W. Creswell, 2010). Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah strategi naratif. Naratif merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu menceritakan kehidupan mereka. Kegiatan ini biasa disebut sebagai wawancara, langkah yang diambil untuk mendapatkan informasi. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif .

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap delapan orang informan yang terdiri dari : 1.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar; 2.) Kepala; 3.) Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar sejumlah dua orang; 4.) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar ; 5.) Perangkat Daerah sebagai Badan Publik dan Pengguna Aplikasi DIOPEN; dan 6.) Masyarakat Pengguna Aplikasi DIOPEN berjumlah dua orang. Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen George R. Terry (1958) yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengaktuan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*) (Terry, 1972).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti melakukan analisis terhadap manajemen Aplikasi DIOPEN (*Disclosure Informasi Publik Terintegrasi*) menggunakan teori fungsi-fungsi Manajemen George R. Terry yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengaktuan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*).

### **3.1 Perencanaan**

#### **a. Perencanaan Awal Sistem Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujianto,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada tanggal 15 Januari 2024, perencanaan awal pembentukan sistem informasi DIOPEN ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya permasalahan seputar penyusunan Daftar Informasi Publik yang sebenarnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari

penyediaan keterbukaan informasi publik. Kondisi yang terjadi pada masing-masing PPID pelaksana di perangkat daerah, penyusunan DIP masih dilakukan secara manual. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah agar penyusunan DIP dapat dilakukan secara otomatis dengan adanya bantuan dari sistem informasi, agar DIP dapat terintegrasi satu sama lain antara PPID utama dengan PPID pelaksana di masing-masing perangkat daerah. Di samping itu, perencanaan dari pembentukan aplikasi DIOPEN termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau term of reference. Dalam KAK DIOPEN diuraikan mengenai rencana pembentukan aplikasi DIOPEN beserta pelengkapannya.

#### b. Inisiator

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada tanggal 15 Januari 2024, inisiator dari aplikasi DIOPEN yang diusung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar. Selain selaku kepala dinas juga berlaku sebagai kepala PPID Utama di Kota Blitar. Dalam Kerangka Acuan Kerja disebutkan bahwa penanggung jawab dari kegiatan pembentukan aplikasi DIOPEN ini adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar.

#### c. Perencanaan Anggaran

Dari wawancara di atas, dijelaskan bahwa memang dalam penganggaran Dinas Kominfo Kota Blitar terutama pada bidang Aplikasi dan Informatika yang secara langsung bertanggung jawab terhadap sistem informasi di Dinas Kominfo Kota Blitar, tidak terdapat penganggaran yang secara eksplisit menyebutkan untuk aplikasi DIOPEN. Akan tetapi, penganggaran yang digunakan terdapat dalam rencana yang telah dianggarkan. Lebih spesifiknya terdapat pada bagian honor untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang menjadi bagian dari tim pembentukan aplikasi.

Pada dokumen di atas diuraikan bahwa salah satu penganggaran pada sub Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah adanya honorarium bagi narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia belanja jasa tenaga informasi dan teknologi. Dalam hal ini tenaga harian lepas yang menjadi bagian dari pembentukan aplikasi DIOPEN masuk ke dalam panitia dari belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.

#### d. Integrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

Aplikasi DIOPEN yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi tentunya menjadi salah satu agenda tersendiri bagi DISKOMINFO Kota Blitar sebagai langkah dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Blitar. Program terkait aplikasi DIOPEN ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis Diskominfo Kota Blitar Tahun 2021-2026.

- 496 -

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Data Awal 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
						2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	2	4	5	6		10	11	12	13
1	TUJUAN : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$(\text{Bobot} \times \text{Domain Kebijakan SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain Tata Kelola SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain manajemen SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain Layanan SPBE})$	Penilaian SPBE dilakukan oleh Kemendagri dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	2,88	3,20	3,25	3,45	3,45
2	SASARAN 1: Meningkatnya kematangan layanan teknologi informasi komunikasi	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100 %	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	81	98%	100%	100%	100%
3	SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev FPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	71	91	96	100	100
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	SP4N LAPOR adalah layanan yang mewadahi aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang sehingga aspirasi atau pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti pihak terkait.		100%	100%	100%	100%

**Gambar 3.1**  
**Dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfotik Kota Blitar dalam Meningkatkan Sistem Keterbukaan Informasi Publik**

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Mujianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada tanggal 15 Januari 2024, menjelaskan bahwa dalam rencana strategis yang disusun dalam jangka waktu 2021-2026 salah satu pokok yang menjadi tujuan dari renstra DISKOMINFOTIK berkaitan dengan indeks SPBE. Indeks SPBE memiliki empat sasaran, antara lain :

1. Berkaitan dengan keterbukaan Informasi publik;
2. Masalah dengan integrasi aplikasi online;
3. Dokumen perencanaan/ evaluasi yang dimanfaatkan untuk statistik sektoral; dan
4. Masalah keamanan.

Dari keempat indeks tersebut, tujuan dari dibentuknya aplikasi DIOPEN bersinggungan dengan tujuan pertama yakni berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Sasaran mengenai keterbukaan informasi publik merupakan muara dari dasar pembuatan DIOPEN.

### 3.2 Pengorganisasian

#### a. Susunan Organisasi Tata Kerja

Secara umum, pengorganisasian DIOPEN kurang lebih hampir sama dengan yang terdapat pada PPID. SOTK pada PPID terdapat dalam Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar.

Berdasarkan SOTK di atas, dapat dilihat bahwa secara umum penanggung jawab PPID utama adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID utama. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa jajaran yang lain seperti beberapa bidang yang membawahi PPID. Hal inilah yang tentunya berkaitan dengan organisasi dari pelaksana aplikasi DIOPEN. Secara umum pengorganisasian aplikasi DIOPEN kurang lebih sama dengan yang ada di PPID dan yang ada di SOTK DISKOMINFO. Namun, secara teknis terdapat operator dan admin yang akan membantu proses input dan verifikasi data ke dalam aplikasi.

#### b. Peran, Tugas, dan Fungsi Masing-Masing Struktur Organisasi Tata Kerja

Dalam penyusunan aplikasi DIOPEN, terdapat beberapa langkah dan peran yang dilakukan oleh masing-masing bagian yang terdapat pada PPID utama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, penyusunan aplikasi DIOPEN melibatkan bidang-bidang dalam Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar. Bidang yang terlibat dalam penyusunan aplikasi DIOPEN antara lain bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Aplikasi dan Informatika, dan bidang Statistik dan Persandian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada tanggal 15 Januari 2024, pada tahap penyusunan aplikasi DIOPEN terdapat beberapa langkah yang dilakukan atau terdapat *milestone* yang harus ditempuh hingga dapat terwujudnya aplikasi DIOPEN.

#### c. *Section in Charge*

Bagian yang menjadi *section in charge* dalam aplikasi ini sebenarnya melibatkan keseluruhan bidang. Dalam artian masing-masing bidang memiliki perannya masing-masing dalam aplikasi DIOPEN. Namun, terdapat dua bidang yang mengambil peran cukup vital dalam aplikasi DIOPEN ini. Yakni bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan bidang Aplikasi Informatika (APTIKA).

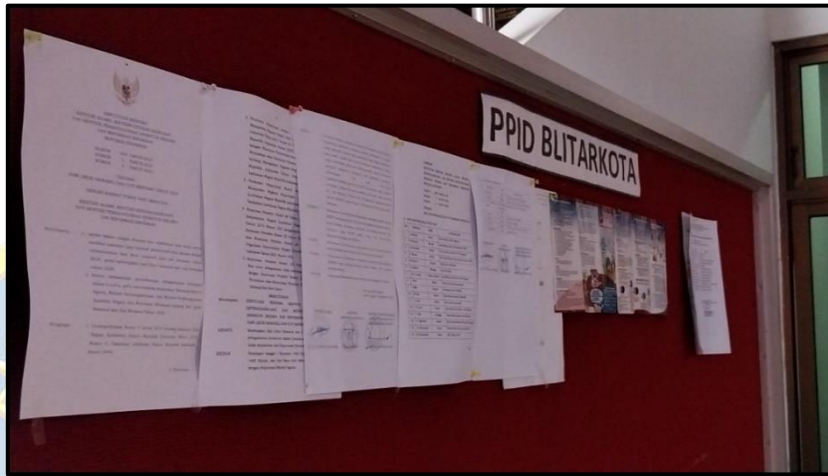
Pada wawancara yang dilaksanakan bersama Kepala Bidang APTIKA pada 10 Januari 2024, dijelaskan bahwa bidang APTIKA memiliki peran dalam pemrograman dan pengoperasian aplikasi. Mulai dari pembentukan desain awal aplikasi hingga uji coba aplikasi. Bidang APTIKA juga bertanggung jawab terhadap maintenance aplikasi yang sedang berjalan. Dalam artian bidang APTIKA memiliki tugas untuk membuat dan memantau sistem aplikasi yang digunakan. Peran bidang Informasi dan Komunikasi Publik, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pranata Humas Terampil Diskominfo Kota Blitar pada 9 Januari 2024 dijelaskan bahwa bidang IKP bertindak sebagai pelayan informasi dan dokumentasi. Artinya bidang IKP yang memberikan pelayanan langsung kepada pemohon informasi yang masuk melalui menu permohonan informasi. Selain itu juga sebelum melayani langsung kepada pemohon, bidang IKP memastikan juga DIP yang diunggah oleh masing-masing perangkat daerah telah diverifikasi oleh pejabat atau ketua PPID

### 3.3 Pengaktuan

#### a. Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat



Setelah aplikasi DIOPEN dibuat dan digunakan, terdapat beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh DISKOMINFO dalam upaya memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat.



**Gambar 3.2**  
**Pemasangan flyer dan pengumuman Aplikasi DIOPEN pada papan PPID Blitar Kota**

Lebih lanjut, dijelaskan aplikasi diopen ini sebenarnya lebih mengarah seperti toko. Artinya ada penjual ada pembeli. Penjualnya adalah pemerintah yang memberi layanan dalam hal ini adalah PPID pelaksana Pembeli diibaratkan sebagai masyarakat yang menikmati atau mengakses layanan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pada PPID utama yang dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada operator. PPID utama memberikan pengenalan maupun bimbingan teknis tentang aturan-aturan tentang masalah informasi publik, keterbukaan, tata cara pembuatan DIP, sampai pada proses sebagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini, itu untuk yang di internal.

#### b. Kebermanfaatan Aplikasi

Bagi PPID utama, aplikasi DIOPEN bermanfaat untuk membantu pengintegrasian informasi yang berada di Kota Blitar. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan DIP sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Melalui aplikasi DIOPEN ini, PPID utama akan semakin mudah untuk mengintegrasikan berbagai informasi sekaligus mengkategorikan sesuai dengan jenis dan kriterianya. Bagi PPID pelaksana, aplikasi DIOPEN memberikan manfaat untuk membantu pengelolaan DIP. PPID pelaksana tidak harus merasa kebingungan untuk mempublikasikan hasil dari informasi yang telah dibuat kepada masyarakat. Sudah terdapat aplikasi yang disediakan oleh PPID utama untuk mempublikasikan informasi maupun data kepada masyarakat. Bagi masyarakat, aplikasi DIOPEN menjadi wadah untuk mendapatkan informasi yang telah diintegrasikan oleh pemerintah. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diinginkan melalui aplikasi DIOPEN. Masyarakat bisa melihat Daftar Informasi Publik yang diinginkan melalui menu DIP online. Apabila informasi yang diinginkan oleh masyarakat tidak terdapat pada menu pencarian maupun DIP online.

Tidak hanya bermanfaat secara internal pemerintah dan masyarakat Kota Blitar, Kepala Dinas Kominfo Kota Blitar juga menyampaikan adanya kebermanfaatan aplikasi DIOPEN ini bagi perangkat daerah yang berada di luar Kota Blitar. Dalam wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada 15 Januari 2024, disampaikan bahwa pada saat proses wawancara dalam visitasi Komisi Informasi Jawa Timur. Disampaikan bahwa PPID utama memiliki aplikasi yang membantu pembuatan DIP. Ternyata, tim Komisi Informasi Provinsi sangat mengapresiasi keberadaan aplikasi tersebut. Mungkin pada beberapa daerah sudah memiliki aplikasi maupun layanan yang sejenis seperti aplikasi DIOPEN. Jika aplikasi DIOPEN mau diadopsi oleh daerah yang lain dengan layanan maupun fungsi yang sama dipersilakan.

### **3.4 Pengontrolan**

#### **a. Laporan Kinerja**

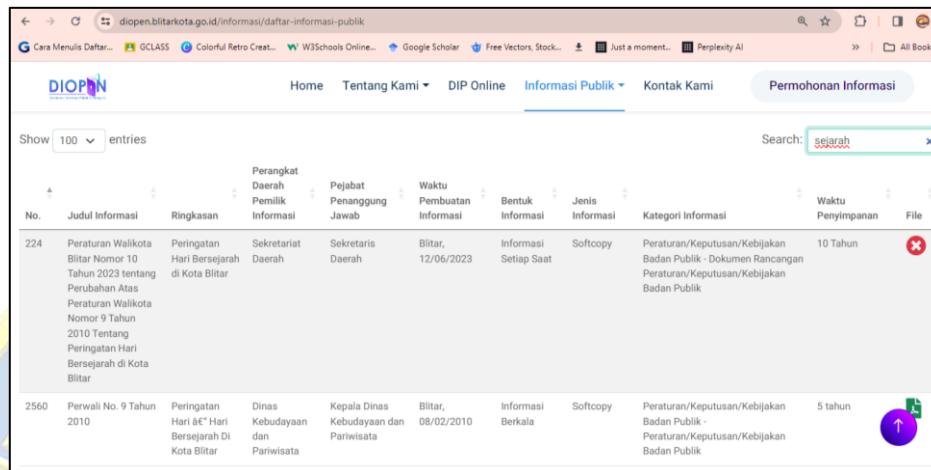
Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar pada 15 Januari 2024, implementasi dari aplikasi DIOPEN ini dituangkan dalam laporan PPID tahunan. Karena aplikasi DIOPEN baru saja diluncurkan pada tahun 2023, maka untuk laporan aplikasi DIOPEN akan masuk ke dalam laporan PPID tahunan pada tahun 2023 nanti. Laporan tahunan PPID merupakan kewajiban dalam undang-undang, bahwa setiap akhir tahun selambat-lambatnya paling tidak maksimal tiga bulan harus menyusun laporan tahunan PPID. Di dalam laporan tahunan PPID ini, salah satu indikatornya adalah berapa jumlah layanan yang diberikan, berapa jumlah daftar informasi publik, berapa jumlah permintaan layanan, kapan waktunya. Jadi aplikasi DIOPEN ini menyumbang data di dalam proses pelayanan informasi publik yang dijadikan bahan untuk laporan tahunan.

#### **b. Review Pengguna Aplikasi**

Review yang diutarakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam wawancara yang dilaksanakan pada 17 Januari 2024, aplikasi DIOPEN ini sangat membantu proses pengintegrasian berbagai macam Daftar Informasi Publik yang diperlukan antar perangkat daerah maupun masyarakat. Aplikasi DIOPEN dinilai sangat penting untuk membantu mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Blitar. Karena aplikasi ini membantu untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik lengkap dengan kategorinya. Aplikasi yang membantu integrasi informasi ini membuat masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk mencari informasi yang mereka perlukan. Ditambah lagi dengan adanya resesi arsip yang turut melibatkan Dinperpusip dalam layanannya, arsip yang berusia lima tahun ke atas akan disimpan dan tidak lagi ditayangkan di dalam aplikasi. Apabila masyarakat membutuhkan informasi yang tidak tercantum dalam DIP online, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan tersebut melalui aplikasi.

Mahasiswa yang notabene sedang melaksanakan proses penelitian merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi DIOPEN ini. Seperti yang disampaikan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang semester 7, Athifa Raissa Putri jurusan Pendidikan Sejarah, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Athifa menyampaikan adanya aplikasi ini sangat membantunya untuk memperoleh informasi dan aturan yang digunakannya dalam menyusun laporan penelitian. Seperti contoh informasi mengenai Peringatan Hari Bersejarah di Kota Blitar yang ia dapatkan melalui

Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Peringatan Hari Bersejarah di Kota Blitar.



The screenshot shows the DIOPEN application interface with a search bar containing the word 'sejarah'. Below the search bar is a table with the following columns: No., Judul Informasi, Ringkasan, Perangkat Daerah Pemilik Informasi, Pejabat Penanggung Jawab, Waktu Pembuatan Informasi, Bentuk Informasi, Jenis Informasi, Kategori Informasi, Waktu Penyimpanan, and File. Two entries are visible:

No.	Judul Informasi	Ringkasan	Perangkat Daerah Pemilik Informasi	Pejabat Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Jenis Informasi	Kategori Informasi	Waktu Penyimpanan	File
224	Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Peringatan Hari Bersejarah di Kota Blitar	Peringatan Hari Bersejarah di Kota Blitar	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Blitar, 12/06/2023	Informasi Setiap Saat	Softcopy	Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik - Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik	10 Tahun	
2560	Perwali No. 9 Tahun 2010	Peringatan Hari 86* Hari Bersejarah Di Kota Blitar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Blitar, 08/02/2010	Informasi Berkala	Softcopy	Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik - Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik	5 tahun	

**Gambar 3.3**  
**Tampilan Pencarian Informasi seputar Sejarah melalui aplikasi DIOPEN**

Meskipun sempat merasa sedikit kesulitan untuk mengakses aplikasi DIOPEN, namun dengan bantuan dari peneliti, Athifa bisa mengakses aplikasi DIOPEN dan mendapatkan data yang dibutuhkan.

Sejauh ini review yang diberikan oleh *app user* aplikasi DIOPEN ini bersifat positif dan membangun. Ada baiknya sosialisasi mengenai aplikasi ini diperluas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan aplikasi ini dengan baik dan membantu pemenuhan akan kebutuhan informasi.

#### c. *Maintenance* Aplikasi

Pada aplikasi DIOPEN, proses *maintenance* aplikasi menjadi tanggung jawab bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA). Wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang APTIKA pada 13 Januari 2024 disampaikan bahwa aplikasi DIOPEN masih tetap digunakan dari awal *launching* hingga saat ini. Setiap bulannya selalu diperiksa atau dicek. Apakah terdapat gangguan pada berjalannya sistem informasi atau apakah terdapat *bug* yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses. Tantangan yang dihadapi dalam *maintenance* aplikasi yakni adalah harus rajin-rajin melihat dan melakukan monitoring evaluasi terkait aplikasi DIOPEN. Membutuhkan waktu dan ketelatenan untuk melakukan pemeliharaan aplikasi. Terutama dari segi pengunggahan dokumen dan informasi oleh masing-masing PPID.

#### d. Kendala

Dari cuplikan wawancara Wawancara yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada 10 Januari 2024 disampaikan bahwa kendala pada berjalannya aplikasi DIOPEN terletak pada pengunggahan dokumen. Dalam hal ini, pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh PPID pelaksana dalam hal ini perangkat daerah. Utamanya dari segi pemilahan konten

yang belum maksimal untuk dilakukan. Untuk sistem sendiri tidak terdapat kendala, sejauh ini aplikasi DIOPEN masih bisa dimanfaatkan dan diakses dengan baik.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti menggunakan teori dasar Fungsi Manajemen George R. Terry (1958) yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan substansi yang terdapat di lapangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad F.P.B , dilakukan analisis dan perancangan aplikasi pelayanan publik *Smart RT/RW* dengan lokus di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dalam melakukan analisis dan perencanaan aplikasi ini, digunakan metode *waterfall* dengan tiga tahap yakni survey, pengembangan aplikasi, dan penerimaan, penelitian mengenai analisis sistem informasi dikaji menggunakan metode *waterfall*(Bani Muhamad et al., 2020).

Dalam penelitian ini, aspek yang menjadi koridor untuk melakukan analisis aplikasi DIOPEN adalah konsep POAC. Konsep POAC yang dikemukakan oleh George R. Terry ini merupakan teori dasar dari berbagai turunan teori manajemen yang lain (Terry, 1972). Sebagai contoh penelitian terdahulu adalah penelitian oleh Ruslaini,dkk pada tahun 2021 mengenai penerapan fungsi manajemen POAC dalam merencanakan kegiatan dan mengaplikasikan aplikasi Ojesa . Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang saat ini dibahas oleh peneliti memposisikan POAC sebagai alat untuk menganalisis aspek manajerial pada suatu aplikasi. Sedangkan pada penelitian Ruslaini POAC berposisi sebagai subjek yang diimplementasikan pada penelitian (Ruslaini et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang telah menggunakan metode POAC sebagai dasar manajemen aplikasi adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Andika Dirgantara dan Utami Dewi Widianti pada tahun 2021 mengenai Sistem Informasi Manajemen Distribusi pada CV. Lasusua Foundation . Pada penelitian ini metode POAC digunakan sebagai metode untuk menganalisis sistem informasi manajemen (Dirgantara & Widianti, 2021). Perbedaan yang terdapat pada penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada substansi pembahasannya. Konsep POAC disesuaikan dengan konteks dari topik pembahasan. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa dimensi *planning* membahas seputar aspek-aspek yang melatarbelakangi terbentuknya aplikasi seperti penganggaran, inisiator, dan integrasi dengan rencana strategis perangkat daerah. Pada penelitian terdahulu dimensi *planning* secara spesifik langsung membahas mengenai penentuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pada dimensi *organizing* terdapat perbedaan substansi pembahasan, dalam skripsi ini dimensi pengorganisasian membahas mengenai struktur organisasi yang berada di balik pembuatan aplikasi DIOPEN, sedangkan pada penelitian terdahulu *organizing* membahas mengenai uji coba pengoptimasian barang yang telah ditentukan pada perencanaan. Pada dimensi *Actuating*, skripsi ini membahas mengenai hasil yang didapatkan dari implementasi aplikasi DIOPEN bagi user. Pada penelitian terdahulu, dimensi *actuating* membahas mengenai perhitungan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Pada dimensi *controlling*, skripsi ini membahas mengenai aspek yang diperlukan untuk memastikan aplikasi DIOPEN berjalan dengan baik. Sedangkan pada penelitian terdahulu bagian *controlling* membahas tentang langkah untuk memastikan barang sudah didistribusikan dengan baik.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan beberapa kekurangan yang belum terdapat dalam pengembangan aplikasi DIOPEN adalah masih kurangnya sosialisasi yang lebih masif, baik kepada masyarakat umum maupun PPID di Kota Blitar. Selain itu, belum terdapat penganggaran yang secara khusus bertujuan untuk pengembangan aplikasi. Sehingga belum terdapat laporan yang secara khusus membahas mengenai aplikasi tersebut. Hal ini terjadi karena aplikasi DIOPEN masih tergolong aplikasi baru. aplikasi ini diresmikan oleh Walikota Blitar pada 23 Juni 2023 (Pemkot Blitar, 2023).

## **IV. KESIMPULAN**

1. Pada dimensi perencanaan, diperoleh hasil bahwa aplikasi DIOPEN dibentuk berdasarkan bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik salah satu poin yang penting adalah pembuatan DIP (Daftar Informasi Publik). Kondisi yang terjadi, DIP yang disusun di masing-masing perangkat daerah rata-rata masih manual. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah agar penyusunan DIP dapat dilakukan secara otomatis dengan adanya bantuan dari sistem informasi, agar DIP dapat terintegrasi satu sama lain antara PPID utama dengan PPID pelaksana. Dengan inisiator pembentukan aplikasi ini adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku penanggung jawab PPID utama di Kota Blitar. Sedangkan untuk indikator penganggaran, tidak terdapat penganggaran yang secara eksplisit menyebutkan untuk aplikasi DIOPEN. Akan tetapi, penganggaran yang digunakan lebih spesifiknya terdapat pada bagian honor untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang menjadi bagian dari tim pembentukan aplikasi;
2. Pada dimensi pengorganisasian, setiap bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi bagian dalam pembentukan aplikasi DIOPEN. Dalam proses pembuatan aplikasi hingga pengimplementasiannya terdapat Milestone yang melibatkan masing-masing bidang pada PPID utama sebagai home based aplikasi;
3. Dimensi actuating menggambarkan adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang terbentuk yakni aplikasi DIOPEN menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Di samping itu, aplikasi DIOPEN ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat, PPID utama, dan PPID pelaksana; dan
4. Pada dimensi pengontrolan, dalam rangka memastikan aplikasi DIOPEN tetap berjalan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan, maka perlu adanya laporan kinerja aplikasi DIOPEN yang sekaligus tergabung dalam laporan kinerja sistem informasi PPID. Di samping itu pemeliharaan aplikasi juga diperlukan guna memperbaiki bug ataupun gangguan yang terdapat pada aplikasi, maintenance aplikasi ini menjadi tanggung jawab bidang Aplikasi dan Informatika. Pada dimensi controlling juga mengenai kendala terkait aplikasi DIOPEN, kendala terletak pada pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh PPID pelaksana. Sedangkan untuk sistem sejauh ini masih dapat digunakan dengan baik

### **Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

## **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, proses penelitian yang dilakukan masih belum sepenuhnya lengkap dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Namun demikian, pada temuan awal ini dapat memberikan inspirasi, saran, dan masukan bagi Pemerintah Kota Blitar terkhusus Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar sebagai *home based* aplikasi. Selain itu, peneliti berharap adanya penelitian yang lebih mendalam dan lebih lanjut terkait aplikasi DIOPEN di Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

A.W., F. (2023). *Keterbukaan Informasi Publik Semakin Tinggi*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/keterbukaan-informasi-publik%09semakin-tinggi>

Anggrayni, I. (2022). Manajemen Pemerintahan Dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Karawang (Studi Pada Aplikasi Tanggap Karawang Atau Tangkar). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 4(1), 10–17. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2458>

Apriyanti, A., Prasetyo, H. N., & ... (2020). Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung. *EProceedings ...*, 6(2), 1590–1606. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/appliedscience/article/view/12198>

Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>

Bani Muhamad, F. P., Bunga, M. S., Darsih, D., & Firmansyah, F. (2020). Analisis Dan Perancangan Aplikasi Pelayanan Publik Smart Rt/Rw Untuk Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 283–293. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.689>

Blitar, P. K. (2022). *Laporan PPID Tahunan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022*.

Dirgantara, A., & Widiati, U. D. (2021). Sistem Informasi Manajemen Distribusi Pada Cv. Lasusua Foundation. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik Dan Ilmu Komputer (JUPITER)*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.34010/jupiter.v1i1.5404>

George R. Terry. (1972). *Principles of Management*. R.D. Irwin.

Hartati, S., & Hadina, F. N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (Simkel) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

*TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 61–72. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.673>

John W. Creswell. (2010). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition* (Third edit). Pustaka Belajar.

Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(2), 231–244.

Maryanti, S., Neneng Komariah, & Saleha Rodiah. (2022). Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 517–533. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2715>

Nurrahman, A., Sabaruddin, S., & Laila Salma, R. N. (2022). Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 4(2), 112–130. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2878>

Pemkot Blitar. (2023). *Pemerintah Kota Blitar Launching DIOPEN, Maksimalkan Pelayanan Informasi Publik*. Blitarkota.Go.Id. <https://blitarkota.go.id/id/berita/pemerintah-kota-blitar-%09launching-%09diopen-%09maksimalkan-pelayanan-informasi-publik>

Romandhon, R., Setiyadi, D., & Efendi, B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i1.2149>

Ruslaini, R., Abizar, A., Ramadhani, N., & Ahmad, I. (2021). Peningkatan Manajemen Dan Teknologi Pemasaran Pada Umkm Ojesa (Ojek Sahabat Wanita) Dalam Mengatasi Less Contact Ekonomi Masa Covid-19. *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 139. <https://doi.org/10.31604/jpm.v4i1.139-144>